

# KULTUS JOKOWI: LANGKAH POLITIK JOKOWI PADA PEMILU 2024

Jonathan Alfrendi<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Antropologi, Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Jalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

\*Corresponding author: emailjonathan.a@gmail.com

---

**Abstract** Tulisan ini berupaya menyelidiki bagaimana langkah politik Jokowi pada Pemilu 2024, dengan menggunakan popularitasnya sebagai pemimpin populis yang ikut membangun kultus pada Jokowi. Kultus Jokowi terjadi tatkala para pendukung Jokowi toleran apabila ia melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran. Jika Jokowi melakukan tindakan nepotis, maka yang disalahkan bukan Jokowi tetapi itu dimaklumi sebagai bagian dari hak politik sebagai warga negara. Artikel ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan antropologi politik untuk menyelidiki secara kultural gaya kepemimpinan Jawa yang sering terlihat dalam kepribadian, citra diri, gaya komunikasi, dan gaya kepemimpinan Jokowi sebagai orang Jawa. Referensi teori yang relevan digunakan dalam kajian ini yaitu oleh Hans Antlov (2002), yang melihat perintah halus adalah suatu model rakyat, melibatkan norma-norma moral, baik bagi penguasa maupun rakyat, dan pemimpin harus dekat dengan rakyat pada kepemimpinan Jawa. Teori tersebut dapat menjelaskan alasan masyarakat terutama para pendukung mengultuskan Jokowi.

## **Keyword:**

*Kultus Jokowi, politik populis Jokowi, politik minta restu, Pemilu 2024*

## **Article Info**

**Received** : 15 Oct 2024  
**Accepted** : 13 Nov 2024  
**Published** : 15 Nov 2024

---

## **1. Pendahuluan**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU No 3 Tahun 2022 menyebutkan bahwa proses pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan pemilihan umum (Pemilu) anggota legislatif dilakukan serentak pada 14 Februari 2024. KPU resmi menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024 pada 13 November 2023. Pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Terpilihnya tiga pasang calon presiden tersebut diwarnai dinamika dan kegaduhan yang dilakukan elite politik sebelum penetapan resmi KPU. Mulai dari dinamika lobi partai-partai politik, pecah kongsi koalisi partai hingga terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Pasal 169 huruf q yang menuai kontroversi publik, karena putusan tersebut membuka ruang bagi kepala daerah seperti Gibran untuk maju di pemilihan presiden

meski belum berusia 40 tahun. Putusan MK tersebut dinilai kontroversi karena melibatkan peran Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang juga adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran sebagai putra sulung Jokowi. Sembilan hari setelah putusan itu disahkan MK, Gibran didaftarkan oleh partai Koalisi Indonesia Maju ke KPU sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto untuk kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 pada 25 Oktober 2023. Putusan MK tersebut, menggunakan istilah Mark Tushnet dari Harvard Law School (2004), bahwa itu membuktikan praktik permainan konstitusional secara kasar (*constitutional hardball*), untuk melegalisasi nepotisme dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden (Sukidi, Kompas 18/4/2024). Selain terasa nepotis, Putusan MK tersebut terasa polemik karena disinyalir terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Jokowi.

Jokowi sudah dua periode menjabat sebagai presiden dan masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024. Berdasarkan konstitusi, ia tidak dapat menjabat sebagai presiden untuk periode pemerintahan berikutnya. Namun, dari dinamika menjelang pemilihan presiden 14 Februari 2024, tampaknya Jokowi berupaya untuk berkuasa lebih lama, baik melalui melalui isu perpanjangan masa jabatan dua atau tiga tahun, dan ketika rencana itu gagal karena tidak direstui banyak pihak maka ia menempuh langkah-langkah politis selanjutnya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan untuk tetap berkuasa, baik melalui dirinya, anaknya, menantunya maupun jaringan politik yang ia bangun meski harus mempertaruhkan reputasi dari gimik politik yang dibuat. Pada 29 Mei 2023 sore, Jokowi mengatakan dirinya akan cawe-cawe untuk kepentingan negara dalam pemilu di hadapan para pemimpin redaksi media di Istana Negara, Jakarta (Kompas.id, 29/5/2023). Penegasan tersebut diungkapkan presiden setelah mengadakan pertemuan dengan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, pada 2 Mei 2023 (Kompas.id, 2/5/2023). Pertemuan itu ditengarai untuk membentuk koalisi besar dalam Pemilu 2024, dan juga aksi cawe-cawe politik Jokowi secara terang-terangan untuk menguatkan peran Jokowi dalam Pemilu 2024. Jokowi dianggap memiliki kepentingan agar presiden terpilih pada periode berikutnya dapat melanjutkan program yang telah dilakukannya (Sukmana et al., 2023). Puncak dari cawe-cawe politik Jokowi dapat dilihat melalui sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan putra sulungnya, Gibran, untuk menjadi calon wakil presiden periode 2024-2029 (Kompas.id, 23/10/2023), yang landasan hukum pencalonannya dinilai oleh publik bernuansa politis dan menuai banyak kritik, seiring disahkan Putusan MK Nomor 90. Oleh karenanya, pencalonan bakal calon wakil presiden Gibran memunculkan polemik politik dinasti keluarga Jokowi.

Gaya kepemimpinan Jokowi yang populis dan terlibat dalam cawe-cawe pada Pemilu 2024, justru ikut membentuk kultus personal pada Jokowi sebagai pemimpin populer, yang dapat campur tangan dalam proses pemilihan presiden. Pengkultusan terhadap Jokowi dapat ditelusuri secara samar dan terang pada periode pemerintahannya kedua dengan memperhatikan tiga fenomena politik, yaitu adanya metafora Jokowiisme, politik minta restu pada Jokowi, dan aksi cawe-cawe Jokowi terhadap pencalonan Gibran pada Pemilu 2024. Mayoritas pendukung Jokowi senantiasa mendukung apapun yang dilakukan presiden meski hal itu melanggar etika nilai-nilai demokrasi. Jika Jokowi melakukan tindakan-tindakan nepotisme dengan membentuk politik dinasti, maka yang disalahkan bukan Jokowi tetapi itu dimaklumi sebagai bagian dari hak politik sebagai warga negara. Tulisan ini berupaya menyelidiki bagaimana langkah politik Jokowi pada Pemilu 2024 yang dengan menggunakan popularitasnya sebagai pemimpin populis dapat membentuk kultus terhadap Jokowi dari para pendukungnya. Tulisan ini juga hendak menyelidiki sejauh mana Jokowi sengaja membangun kultus personal untuk mempertebal citra diri, dan juga dapat digunakan sebagai modal politiknya pada Pemilu 2024? Lalu sejauh mana konsekuensi dari kultus Jokowi tersebut terhadap dirinya dan juga

pelaksanaan kontestasi Pemilu 2024?

Kajian mengenai kultus personal umumnya tergambar pada tokoh agama. Hal ini terlihat dari studi Huda (2011) yang melihat bahwa kepemimpinan kiai dalam pesantren memiliki kesamaan indikasi pada praktik kultus tradisional di Barat, yang antara lain terbentuk melalui: doktrin dan norma yang membentuk karisma kiai pada santri di pesantren sehingga kiai mendapatkan perlakuan istimewa dari santri dibandingkan tokoh masyarakat lain. Namun, tidak semua tokoh agama memiliki kepemimpinan yang karismatik. Karisma pada tokoh agama seperti kiai, pendeta, atau bhikkhu umumnya terbentuk karena berasal dari anugerah Tuhan dan dilengkapi dengan bentuk kualitas kepribadian yang saleh, kudus, dan suci, sehingga keteladanan hidup tersebut membuat mereka dapat mengubah perubahan individu dan kelompok, dan oleh karenanya mereka dihormati, disegani, dipatuhi secara rela dan ikhlas.

Pemimpin atau tokoh karismatik juga cenderung muncul dalam bidang politik. Pandangan tersebut relevan dengan tesis Marx Weber (1968) yang melihat bahwa basis kuasa dapat merujuk pada otoritas, seperti otoritas legal-rasional berupa wewenang yang melekat pada jabatan pada organisasi pemerintahan ataupun otoritas tradisional yang bersumber dari adat (Hudayana, 2011), dan otoritas juga bisa lahir dari karisma. Dalam bidang politik, dasar wewenang karismatik tidak diatur oleh suatu peraturan hukum tetapi bersumber pada diri pribadi bersangkutan (Soekanto, 2019), artinya tokoh-tokoh politik dapat membentuk pesona dan daya tarik pribadinya untuk dikenal dan dihormati oleh orang lain. Kekuasaan politik semacam itu merupakan kekuasaan dan prestise terhadap para partisan (Mulder, 2001).

Peneliti Ehito Kimura (2017) juga menyebut Jokowi sebagai sosok yang karismatik tetapi tetap membumi dan rendah hati. Mengikuti aliran tesis tersebut bahwa kultus personal yang diperoleh Jokowi dapat terbentuk dari otoritas legal-rasional melalui jabatannya mulai sebagai wali kota, gubernur hingga presiden dengan memberikan program-program populis antara lain memberikan berbagai bantuan sembako langsung pada masyarakat, menggelontorkan subsidi bahan bakar, memberikan jubelan sertifikat tanah untuk masyarakat adat dan sipil, membangun waduk, rumah sakit, bandara dan infrastruktur lainnya di kota dan desa, bahkan membangun kereta cepat dan kereta bawah tanah untuk warga komuter. Bagi Weber kekuasaan yang ada pada individu atau kelompok tidak dimaknai sebagai pengaruh saja tetapi dapat dilihat pada tindakan seseorang (Maliki, 2017). Pemimpin bangsa atau elite politik juga memiliki karisma seperti Mahatma Gandhi di India dan Soekarno di Indonesia yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakatnya karena kapasitas pribadinya. Sementara, ada pula pemimpin politik yang karismatik karena diperoleh pada jabatan otoritas legal-formal yang dimilikinya, seperti Napoleon, Hitler, Lenin, dan Fidel Castro. Tidak sedikit pula pemimpin bangsa yang karismatik mendapat dukungan simpatik dari mayoritas masyarakat sehingga membuat mereka menjadi pemimpin diktator dan sangat dicintai oleh masyarakatnya. Pemimpin-pemimpin diktator seperti Mussolini dari Italia, Mao Zedong dari Tiongkok, Duvalier dari Haiti, Mengistu dari Etiopia, Kim Il-sung dari Korea Utara dikenang sebagai pemimpin yang mesianik oleh rakyatnya karena berhasil menciptakan kultus-kultus personal pada masyarakatnya. Mengapa bisa? Para diktator tersebut menciptakan narasi-narasi juruselamat untuk mencari perhatian masyarakat di tengah situasi dan kondisi politik, ekonomi, dan sosial di negaranya sedang tidak baik, para diktator tersebut tidak henti-hentinya membangun citra mereka sendiri dengan mendorong masyarakat luas untuk mengagungkan mereka (Dikötter, 2019).

Beberapa kajian mutakhir memberikan contoh relevan untuk melihat pengkultusan terhadap pemimpin negara. Valerie Sperling (2016) melihat maskulinitas telah lama menjadi ciri khas Presiden Rusia Vladimir Putin sejak dua dekade terakhir. Sperling melihat aura macho Putin merupakan citranya sebagai pemimpin tangguh yang tidak akan membiarkan negara-negara

Barat melemahkan Rusia. Francis Fukuyama dalam *“What is Populism”* (2017) mengungkapkan tiga ciri utama untuk mengidentifikasi pemimpin populis. Pertama, populisme menerapkan kebijakan jangka pendek yang mengutamakan rakyat, seperti subsidi dan fasilitas gratis. Kedua, pemimpin populis memiliki konsep “rakyat” karena dibatasi suatu identitas seperti agama dan etnis. Ketiga, gaya kepemimpinan populis berperan dalam membangun kultus personal. Sementara, pandangan Asvi Warman Adam (2023) menilai bahwa dengan kultus individu, seorang pemimpin akan dapat dianggap selalu benar, tidak boleh dibantah, dan harus diikuti segala perintahnya. Pandangan Adam tersebut diperkuat oleh Made Supriatma (2023) yang menunjukkan bahwa kultus personal umumnya terjadi pada pemimpin populis seperti Presiden Amerika Serikat ke-45 dan ke-47 Donald John Trump dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa para pendukung kedua pemimpin tersebut membenarkan apa saja yang dikatakan oleh presiden, dan disitulah kultus terbentuk.

Berdasarkan paparan studi-studi sebelumnya tersebut dapat dilihat bahwa para pemimpin negara atau elite yang memiliki otoritas jabatan sebagai basis kuasa dapat membentuk kepemimpinannya yang karismatik, wibawa, dan juga dengan modal kultural semacam itu dapat membuat tindakan-tindakan yang populis untuk tujuan mengendalikan, memberikan pengaruh maupun menarik perhatian masyarakatnya. Sebagai pemimpin populis, Jokowi dengan sengaja akan menciptakan tindakan-tindakan populis untuk menjaga kepercayaan publik, baik melalui program-program pro-rakyat maupun mendengar keluhan warga ketika blusukan di daerah-daerah, dengan tujuan dapat menciptakan buih-buih pujian untuknya, juga untuk mengukur loyalitas dukungan masyarakat terhadapnya. Dengan demikian, ia dapat menjaga basis elektoral untuk memperkuat posisi politiknya dalam waktu lama.

Mengikuti alur berpikir demikian maka kepemimpinan populis Jokowi dapat membentuk kultus personal melalui citra orang baik dan presiden sederhana dari para pendukungnya, menteri, dan juga dari elite-elite yang ada disekitarnya. Relasi patron-klien terbangun erat antara Jokowi dan pembantunya yang loyal, yang kemudian dapat mempengaruhi relasi dan perilaku mereka hingga menuntun masyarakat untuk terus mendukung dan loyal pada Jokowi. Jika mayoritas rakyat sudah semakin kagum, maka mereka akhirnya akan memuji Jokowi.

## 2. Metode

Seluruh tulisan ini merupakan kajian literatur dengan analisis menggunakan pendekatan antropologi politik untuk menyelidiki secara kultural gaya kepemimpinan Jawa yang sering terlihat dalam kepribadian, gaya komunikasi, dan gaya kepemimpinan Jokowi sebagai orang Jawa. Referensi teori yang relevan digunakan dalam kajian ini yaitu yang dikemukakan oleh Hans Antlov (2002), yang melihat perintah halus adalah suatu model rakyat, melibatkan norma-norma moral, baik bagi penguasa maupun rakyat, dan pemimpin harus dekat dengan rakyat. Teori ini dipilih penulis karena dalam perintah halus berkaitan dengan gagasan tentang kekuasaan pada orang Jawa ((Anderson, 1971; Antlov, 2002)), sebagaimana yang ditunjukkan dalam gestur politik Jokowi melalui simbol-simbol kekuasaan Jawa, seperti dekat dengan rakyat dan mengutamakan koalisi agar tercipta harmoni, pemerintahan yang stabil.

Gaya komunikasi lisan dan pidato Jokowi menggunakan bahasa percakapan atau tutur (*parole*) berupa bahasa keseharian yang lebih *to the point*, dilengkapi dengan dialek Jawa yang khas dan gestur Jokowi sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan (Dwi Sulistiyani, 2018). Penelitian ini tidak menganalisis gaya komunikasi Jokowi, tetapi dengan memahami gaya komunikasi Jokowi terutama saat merespon situasi-situasi yang krusial dapat menjelaskan sejauh mana emosi dan gesturnya ditampilkan secara halus dan nyaris tersembunyi, yang disebut oleh Antlov sebagai emosi orang Jawa (Antlov, 2002). Dengan menggunakan teori

perintah halus penulis dapat menjelaskan bagaimana Jokowi mengelola relasi patron-klien terhadap para pendukung dan pembantunya melalui kepatuhan sekalipun Jokowi melakukan kekeliruan-kekeliruan terutama pada kontestasi Pemilu 2024. Teori itu juga dapat menuntun kita untuk melihat pola-pola pengkultusan terhadap Jokowi.

Konteks yang digunakan dalam kajian ini yaitu bulan-bulan menjelang Pemilu 14 Februari 2024 berlangsung dengan memperhatikan dinamika-dinamika partai politik dalam mengukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029 dan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada pola-pola pengkultusan pada presiden.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Pembentukan Kultus Jokowi: Kombinasi Politikus Populis dan Oportunis**

Bagian ini hendak menunjukkan bagaimana periode kedua pemerintahan Jokowi (2019-2024) menunjukkan minimnya kontrol dari oposisi. Pada periode ini jugalah Jokowi memanfaatkan kekuasaannya untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024, karena melihat adanya kesempatan (oportunis) untuk menentukan capres dan cawapres masa depan Indonesia. Jokowi sendiri berhasil menjadi Presiden RI ke-7 karena memainkan politik populis dengan citra sederhana dan pekerja keras (Mietzner, 2015) dan juga disebut populis teknokratis (Kimura, 2017), bahkan Jokowi menggunakan strategi populisme pragmatis dan dilakukan dengan cara yang lebih halus, seperti blusukan untuk mendengarkan berbagai keluh masyarakat dan memberikan solusi secara langsung pada masyarakat (Budiman et al., 2022).

Ada banyak definisi mengenai populisme, tetapi agaknya para ahli sepakat pada basis tesis dari populisme yaitu gagasan mengenai rakyat, *the people* atau *populus* (Anugrah, 2017). Populisme merupakan bukan sebuah tindakan politik anti-elite, tetapi tindakan politik untuk rakyat. Populisme sebagai gaya berpolitik teatral memerlukan adanya aktor-aktor dan panggung (publik), sehingga dapat memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas untuk warga yang termarginalkan. Pada posisi demikian populisme bukan merupakan tindakan antidemokratis, tetapi populisme cenderung mengabaikan supremasi hukum dan akuntabilitas.

Sebagaimana disebut oleh Kimura (2017) bahwa untuk melihat Jokowi sebagai tokoh populis teknokratis harus dipahami sejak ia meniti karir pada aras lokal yakni sebagai Wali Kota Surakarta periode 2005-2012. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kepiawaian menyelesaikan masalah-masalah yang berlarut-larut mengenai relokasi pedagang kaki lima di kawasan Monumen 45 Banjarsari, Surakarta tanpa kekerasan dan riak di media massa pada 2005. Saat itu, Jokowi bersama wakilnya FX Hadi Rudyatmo mengadakan pertemuan hingga puluhan kali kepada para pedagang tetapi sulit mencapai solusi yang pas. Pedagang mulai melunak setelah berembuk empat bulan lamanya untuk setuju relokasi setelah pedagang diluluhkan hatinya setelah dibuat kenyang makanan dan dipenuhi apa saja kebutuhannya (Kompas.id, 3/10/2023). Pemerintah Surakarta juga memberikan kios-kios untuk para pedagang di Pasar Klitikan Notoharjo, sehingga pedagang menjadi senang dan setuju untuk relokasi. Jokowi menggunakan kebijakan reformis yang pro-rakyat kecil seperti pedagang.

Menurut Made Supriatma (2023) Jokowi merupakan politikus yang oportunis. Sebab, Jokowi tahu betul memanfaatkan momentum dari popularitasnya. Belum selesai masa jabatan periode kedua sebagai Wali Kota Surakarta, Jokowi sudah melihat ada peluang politis pada pemilihan gubernur di Jakarta pada 2012. Dia direkomendasikan oleh PDIP untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2012, dan berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014. Jokowi paham betul ketika menjadi Gubernur Jakarta ia lebih mudah mendapat sorot media untuk dikenal publik dan juga elite nasional. Ia memanfaatkan dengan baik momentum dan posisi tawar tersebut dengan melakukan kerja-kerja populis, seperti blusukan ke pemukiman warga,

blusukan ke mal, rel kereta, dan mengecek gorong-gorong dengan mengenakan pakaian dinas. Ia menampilkan diri seperti representasi rakyat biasa yang menjadi pejabat, yang dicitrakan dari pakaiannya, bentuk rambut, gaya bicaranya, dan pilihan sepatunya. Kebiasaan Jokowi menggunakan sepatu kets maupun sneakers dalam bekerja menyimbolkan gerakannya yang luwes saat aktivitas dan simbol tersebut kurang terwakili pada sepatu pantofel yang terkesan kaku dan formal saat blusukan maupun menemui warga. Entah disadari atau tidak, kebiasaan Jokowi mengenai sepatu tersebut kemudian diikuti oleh pejabat dan politikus lain di Indonesia.

Manuver Jokowi sering kali memiliki nasib mujur. Ia merupakan politikus yang bukan aktivis, bukan pemilik dan ketua partai politik. Namun, sebagai tokoh yang lahir tanpa amunisi politik yang memadai, Jokowi membangun kekuatan sosial akar rumput sebagai kekuatan utamanya yang dibebat dalam slogan “Jokowi adalah kita, Jokowi adalah orang baik, Jokowi berasal dari rakyat” untuk melenting naik dari satu tangga kepemimpinan lokal menuju tangga-tangga yang jauh lebih tinggi-nasional dengan memanfaatkan momentum popularitas dan akhirnya terpilih menjadi presiden selama dua periode. Bahkan, Airlangga Pribadi Kusman (2024) menyebut Jokowi sebagai Bonapartisme Baru karena manuver Jokowi dapat membangun aliansi-aliansi kekuatan sosial untuk menjadi pemimpin nomor satu seperti strategi Napoleon Bonaparte. Jokowi menampilkan kepribadian Jawa yang sederhana, santun, dan merakyat yang berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dengan mesin politik yang sangat baik selama dua kali pemilu berturut. Di mata rakyat biasa, Jokowi adalah representasi rakyat sipil, yang mampu meniti tangga dari aras lokal hingga menjadi kepala negara dalam waktu cepat dan instan.

Saat menjadi presiden, ia semakin sering blusukan mengunjungi rakyat biasa di sawah, di pasar, di mal, di tempat wisata, masyarakat adat, main sepak bola bersama warga, santap makanan di resto sederhana, dan sebagainya. Ia juga membuat kebijakan populis seperti memberikan bantuan sosial (bansos), sertifikat tanah, membangun ragam infrastruktur, membagikan sepeda. Rakyat biasa, yang mayoritas dari penduduk negeri ini, terpesona dengan gaya kepemimpinan Jokowi dan ketika ia melakukan kunjungan kerja ke suatu daerah maka warga selalu menyambut Jokowi dengan antusias, histeris, dan padat orang. Hampir setiap pekan ia mengunjungi rakyat perkotaan dan pedesaan yang terhimpun dari Aceh hingga Papua. Rakyat biasa yang sebagian besar dari penduduk di negeri ini menjadi terpesona karena ia juga kerap kali memberikan bantuan (sembako, barang) kepada warga sebagai bentuk kepedulian sosial. Dengan latar belakang sebagai pengusaha kayu, Jokowi membenahi infrastruktur sebagai jalan memakmurkan rakyat Indonesia. Di banyak tempat, ia membangun berbagai fasilitas transportasi, merenovasi pos-pos lintas antar negara, juga memperbaiki berbagai prasarana yang sulit dibenahi oleh sektor swasta.

Kepandaian lain dari Jokowi yaitu dapat membangun koalisi. Pada periode kedua pemerintahannya (2019-2024), Jokowi berhasil menghimpun sebagian besar partai politik untuk mendukung pemerintah di lembaga legislatif. Hampir tidak ada partai oposisi yang mampu menyeimbangkan kekuatan partai koalisi pemerintah. Itu karena peran Jokowi yang melakukan negosiasi dengan elite-elite parpol sehingga ia memiliki dukungan mayoritas yang nyaris mutlak untuk pemerintah. Pada cara tersebut Jokowi sedang mempraktikkan kepemimpinan Jawa, dalam menciptakan kestabilan dan harmoni (Antlov, 2002) yang diperlukan membangun koalisi dengan merangkul partai-partai lain dan seteru. Cara Jokowi merawat koalisi itu dengan memberikan derma seperti berbagai jabatan strategis dan porsi kekuasaan ke aliansi koalisi. Sven Cederroth (2001) menilai tindakan derma politik semacam itu perlu dilakukan untuk memperoleh dukungan dari pihak-pihak lain dan juga untuk mengamankan kekuasaan, sebagaimana yang ia teliti pada strategi pemimpin lokal di Jawa.

Jokowi menyadari bahwa ia bukan ketua partai politik. Namun, ia memiliki relawan-

relawan yang militan dan agar tetap loyal padanya, Jokowi memberikan mereka jabatan-jabatan strategis seperti menteri, wakil menteri, komisaris lembaga atau badan negara. Transaksi semacam ini tidak hanya diberikan kepada relawan tetapi juga kepada oposan dan seteru dalam lingkaran kekuasaan maupun luar kekuasaan formal seperti aktivis dan para eksponen untuk diajak bergabung ke pemerintahan agar tidak berisik mengkritik pemerintah. Transaksi demikian menarik bagi sebagian pihak karena jabatan tidak hanya mengandung status dan reputasi sosial melainkan juga akses terhadap penggunaan anggaran. Pada tataran ini, Jokowi berhasil menerapkan gaya kepemimpinan Jawa yaitu memimpin dengan cara kolektif agar tercipta stabilitas. Pesaing dan seteru politik berhasil ia rangkul untuk menjadi sekutu untuk kerja sama dalam kabinet pemerintahan Jokowi periode kedua, seperti Sandiaga Salahuddin Uno dan Prabowo Subianto dengan memberikan masing-masing jabatan menteri yang strategis. Dengan demikian periode kedua pemerintahan Jokowi nyaris tanpa pergolakan politik yang riuh karena ia berhasil mengontrol partai oposisi. Jokowi juga melengkapi diri dengan pasukan-pasukan *online (buzzer)* yang siap membuat narasi tentang kebaikan dan keberhasilan pemerintahannya (Supriatma, 2023). Jokowi juga semakin memberikan perlindungan kepada para elite partai, oligarki, melalui revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja agar mengamankan kepentingan kelompok elite.

Kombinasi antara kepandaian kompromi dengan elite, merangkul seteru politik, dan mengontrol kebebasan suara serta menjaga fanatisme relawan pada arus bawah ini memberikan hasil maksimal terhadap pemerintahan Jokowi di periode kedua. Di saat bersamaan Jokowi berhasil membangkitkan nasionalisme rakyat dengan sejumlah proyek mercusuar yang tampaknya membuat reputasi Indonesia semakin kinclong di mata dunia. Lihatlah pembangunan sirkuit Mandalika, menjadi tuan rumah G-20 di Bali dan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo NTT, menandakan Jokowi dapat melakukan mega proyek apa saja tanpa mendapatkan hambatan yang berarti. Bahkan Lembaga Survei Indonesia (2023) pada 10 Desember 2023 atau dua bulan sebelum digelar Pemilu 2024 merilis survei bahwa mayoritas (76 persen) responden merasa cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi, meski ekonomi memburuk. Alasan kepuasan responden yang paling tinggi (33,4 persen) yaitu memberi bantuan pada rakyat kecil dan membangun infrastruktur. Jokowi menikmati berbagai hasil survei elektoral terhadap pemerintahannya yang sangat tinggi. Perolehan hasil survei terhadapnya berhasil mencapai di atas 80 persen, atau *polling* tingkat kepuasan yang hanya dinikmati oleh penguasa seperti Vladimir Putin dari Rusia (Supriatma, 2023). Tingkat popularitas Jokowi yang tinggi tersebut secara tidak langsung menguatkan peran politiknya dalam Pemilu 2024 dan setelahnya.

Kepemimpinan Presiden Jokowi yang minim kontrol dari parlemen nyaris mirip seperti yang dinikmati oleh Soeharto pada era Orde Baru. Yang membedakan Jokowi tidak menggunakan senjata untuk mencapai tujuan-tujuannya. Alat utama yang digunakan Jokowi tentu saja otoritas yang menonjol pada dirinya secara wewenang legal rasional, tradisional (legitimasi oleh masyarakat), dan juga karisma (legitimasi dari kepercayaan publik) yang disokong oleh instrumen-instrumen kekuasaan dan hukum. Hasilnya, politik dinasti yang semula dihembuskan oleh orang-orang kepercayaannya tidak mengalami penolakan signifikan, bahkan publik seolah menerima politik dinasti Jokowi ketika ditampilkan secara terang-terangan. Tidak mengherankan sejumlah kandidat yang berlaga dalam pilkada harus pamer kedekatan dengan keluarga dinasti Jokowi atau dengan cara meminta restu pada Jokowi apabila ingin meraih kemenangan. Pada titik inilah terjadi pembentukan kultus personal terhadap Jokowi.

Istilah kultus individu terhadap pemimpin negara muncul pertama saat Nikita Khrushchev mengancam pemerintahan Joseph Stalin pada 1956, dengan menyebutnya secara sarkas *cult of personality* (kultus personal) sebagai *'loathsome adulation'* dan *'mania for greatness'* (Dikötter,

2019). Para pemimpin negara diktator sebenarnya mengandalkan dua instrumen kekuasaan yaitu teror dan kultus agar mereka dapat berkuasanya semakin lama dan panjang. Kultus dan terror tersebut sengaja diciptakan untuk menutupi kelemahan mereka dari kehilangan jabatan. Jadi, ketakutan mereka bukan hanya kepada rakyatnya sendiri tetapi juga kepada para pembantu dan pendukungnya di istana yang sewaktu-waktu dapat khianat, sehingga mereka acap kali memanfaatkan orang-orang kepercayaannya untuk menjaga kekuasaan selama mungkin dengan membuat berbagai strategi untuk menyingkirkan para pesaing. Bagi sang diktator, menciptakan kultus adalah strategi efektif agar jabatan dan kekuasaannya terjaga lama dan dicintai warganya. Para diktator biasanya secara sengaja membangun citra mereka sendiri dengan menciptakan narasi-narasi juruselamat atau mesianik agar masyarakat mengagungkan mereka di tengah situasi ekonomi, negara, sosial pada negaranya yang sedang tidak baik (Dikötter, 2019), seperti yang dilakukan oleh Hitler, Duvalier, Mussolini, Ceaușescu, Kim Il-sung. Sang tiran tersebut dapat menciptakan ilusi dukungan rakyat melalui kultus-kultus yang dibentuk.

Begitulah para diktator maupun tiran yang sengaja menciptakan kultus personal agar tidak kehilangan jabatan. Dalam kasus Jokowi, pola dan tujuan penciptaan kultus juga mirip dengan diktator lawas tersebut tetapi instrumennya beda. Bangunan pengkultusan mulai disadari oleh Jokowi setelah ia tahu begitu tinggi popularitasnya yang dibenarkan oleh hasil survei dan didukung oleh banyaknya fan yang mengelukan dia saat melakukan kunjungan kerja di daerah. Pengkultusan terhadap Jokowi sangat berguna untuk menjaga popularitas dan elektabilitas pemerintahannya. Jokowi sejak awal menyadari bahwa ia hanya anggota partai bukan ketua partai, sehingga ia memperkuat diri dengan merangkul partai-partai lain yang memiliki kursi banyak di parlemen. Ia juga merangkul kekuatan antarelite serta pengusaha dengan mengamankan kepentingan atas (elite) dan rakyat (bawah), agar basis dukungan terhadapnya semakin solid. Jika dukungan semakin solid, disitulah kultus Jokowi menguat. Sebaliknya, kekuatan kultus Jokowi dapat rapuh apabila tidak ditopang oleh pendukungnya.

Para pendukungnya akan permisif apabila Jokowi melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran. Para pendukungnya juga toleran apabila Jokowi lemah dalam kemampuan Bahasa Inggris dalam pertemuan internasional dan minus kedalaman intelektual pada bidang-bidang tertentu. Para pendukungnya akan mendukung ketika putra Jokowi, Gibran, sebagai calon wakil presiden, meski kita semua paham bagaimana dinamika mekanisme pencalonan tersebut dan implikasi-implikasi dari gejolak di balik putusan Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2023 yang menimbulkan kontroversi karena pencalonan Gibran ditengarai melanggar konstitusi. Peristiwa-peristiwa kontroversi yang terjadi pada keluarga Jokowi sering kali menjadi polemik dan juga acap kali tidak mengalami penolakan, bahkan dimaafkan,

Semakin lama semakin terlihat bahwa Jokowi menikmati kekuasaan yang nyaris seperti kultus. Jika Jokowi melakukan kesalahan, maka yang disalahkan bukan presiden Jokowi, tetapi para menteri atau orang-orang yang disekelilingnya. Akan selalu ada permintaan maaf apabila presiden tidak dapat melakukan apa yang ia janjikan. Sebagian besar orang maupun pendukungnya tidak akan mempersoalkan tindakan nepotis terhadap menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berlaga dalam pilwakot Medan 2020 dan kemudian melangkah pada kontestasi pemilihan gubernur 2024. Begitu pula dengan kasus Gibran sebagai pilwalkot Surakarta 2020 yang kemudian memilih melenting dalam kontestasi calon wakil presiden pada Pemilu 2024, serta putusan Keputusan Mahkamah Agung yang membuat putra bungsu Jokowi yaitu Kaesang Pangarep dapat menjadi calon gubernur. Dalam soal nepotisme, para pendukung Jokowi berupaya pasang badan dengan mengambil pembenaran dari kebiasaan politik dinasti yang juga banyak dilakukan oleh elite-elite. Pada momen-momen yang menyangkut keluarga Jokowi semacam itulah kultus Jokowi dapat menguat kencang.

Kultus Jokowi juga terlihat tatkala para pendukungnya seolah mendukung ketika ia berseteru dengan PDI Perjuangan, partai pengusung yang membuat ia menang pada kontestasi lima kali pemilu. Para pendukungnya dan sebagian rakyat juga seolah mendukung ketika ia terang akan cawe-cawe pada Pemilu 2024, dan mengalihkan dukungan pada Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pilpres 2024 daripada mendukung calon presiden yang didukung oleh PDI Perjuangan. Para pendukungnya memaklumi akan upaya-upaya Jokowi untuk lepas dari pengaruh PDI Perjuangan karena dianggap sebagai petugas partai.

Jokowi adalah politikus populis sekaligus oportunistis yang handal. Jokowi memiliki keterampilan untuk menjual dan mempengaruhi orang untuk membeli, dan keterampilan inilah yang membentenginya dari berbagai kesalahan (Supriatma, 2023). Kultus terhadap Jokowi semakin terlihat menjelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024 dan waktu-waktu setelahnya karena setelah tidak menjadi presiden, Jokowi semakin lebih leluasa untuk menjaga popularitas. Ia seolah memiliki kekebalan karena kesalahan-kesalahannya yang bahkan melanggar etika umum dan dimaklumi dan dianggap wajar oleh para pendukungnya.

### **3.2 Perintah Simbolis Sebagai Pengkultusan**

Keputusan Jokowi merestui dan mendoakan putra sulungnya, Gibran, untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 (Tim Kompas, 2023), menunjukkan kuatnya pengaruh Jokowi pada kontestasi pilpres meski kapasitas dan pengalaman Gibran belum cukup teruji di tingkat nasional karena ia baru dua tahun menjadi Wali Kota Surakarta. Restu dari Jokowi sebagai bapak kandung sekaligus sebagai presiden memuluskan jalan putranya dalam pilpres, dan juga membuka terbentuknya koalisi partai politik yang besar Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang anggotanya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Garuda dan Partai Adil Makmur (Partai Prima). Bahkan, di hadapan para tokoh partai pengusung, Jokowi menyebutkan anaknya bisa menarik suara pemilih di Jawa Tengah (Tempo, 30/10/2023). Dukungan Jokowi terhadap putranya kemudian semakin terlihat saat ia menemui para relawan seperti Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) untuk memenangkan Prabowo dan Gibran pada Pemilu 2024 di Istana Negara pada 24 Oktober 2023 (Tempo, 30/10/2023), dan relawan-relawan memahami pesan simbolis dari presiden. Beberapa hari sebelum Gibran resmi diputuskan menjadi cawapres Prabowo Subianto, kelompok relawan pendukung Jokowi yaitu Projo menyatakan mendukung Prabowo karena figurinya sesuai dengan kriteria pemimpin yang diinginkan oleh Jokowi, meski Jokowi tidak secara gamblang menyebutkan arah dukungannya pada Projo (Kompas.id, 14/10/2023).

Tindakan Jokowi berupa restu pada putranya, juga memberikan arahan-arahan simbolis kepada kelompok relawan dan di hadapan tokoh-tokoh partai KIM agar memenangkan Prabowo dan Gibran dalam kontestasi pilpres bagai menunjukkan adanya perintah halus dari atasan kepada bawahan, bukan dengan perintah langsung. Perintah halus mencerminkan bentuk kekuasaan politik jawa (Antlov & Cederroth, 2001), yang dilakukan oleh Jokowi dengan lembut yang ditampilkan melalui kode-kode simbolik tertentu. Bawahan maupun sekutu politiknya harus serta memahami 'petunjuk halus' tersebut, apabila mereka tidak mengikutinya mungkin akan mendapat ganjaran tertentu, dan sebaliknya apabila mengikuti petunjuk halus tersebut dengan hormat mereka akan mendapat jabatan atau hadiah-hadiah porsi kekuasaan lainnya. Perintah halus menciptakan relasi patronase antara Jokowi dan pendukungnya, maka loyalitas diukur dari kepatuhan dan tanggung jawab menjalankan perintah dengan baik. Bentuk kepemimpinan patronase semacam itu banyak terjadi pada elite-elite jawa untuk mengendalikan warganya maupun pendukungnya (Husken, 1998), maka seorang bawahan yang baik harus

membuat atasannya merasa puas (Antlov & Cederroth, 2001).

Perintah halus yang dijalankan oleh penguasa seperti Jokowi tidak perlu menggunakan kekuasaan fisik. Cukup bersembunyi di balik idiom “tugas orangtua mendoakan dan merestui”, “jangan tanya saya”, “bukan urusan saya”, “bukan keinginan saya”, tapi keinginan anaknya yang berubah secara tiba-tiba dari yang awalnya nyaman berbisnis lalu berubah menjadi nyaman menjadi politikus. Ini barangkali dapat menjelaskan bagaimana Jokowi menampilkan ungkapan-ungkapan halus dengan getaran-getaran emosional yang kecil khas kebudayaan Jawa tatkala ditanya oleh wartawan atau siapa pun mengenai pencalonan cawapres Gibran. Namun, acap kali ungkapan halus Jokowi tersebut justru kontradiktif dengan tindakan Jokowi berikutnya, dan bahkan Ben Bland (2020) menjuluki Jokowi sebagai *the man of contradiction*, dan menyebut Jokowi telah meluncurkan politik dinasti (*launching his own nascent political dynasty*).

Sebagai politikus Jawa, Jokowi menggunakan gaya kepemimpinan Jawa seperti perintah halus dan menggunakan otoritas karismatik dalam memimpin, yang membuat menteri, elite-elite, dan para pendukungnya mudah menuruti kehendak presiden. Barangkali hal itu dapat menjelaskan mengapa Jokowi dapat dengan mulus mengeksekusi berbagai kebijakan-kebijakan yang besar dan berisiko selama sepuluh tahun tanpa hambatan berarti, tentu selain pengaruh dukungan partai PDI di parlemen. Perintah halus atau perintah simbolis menjadi moda operasi kekuasaan Jokowi yang ditandai berikut ini. Setelah koalisi partai terbentuk dan tanpa partai oposisi yang kuat di parlemen, pemerintahan Jokowi dengan mudah membuat undang-undang secepat kilat seperti Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan revisi Undang-Undang Pilkada tanpa memperhatikan prosedur hukum yang ada. Maka, disinilah pengaruh persona Jokowi dalam mengendalikan aparatur dan politisi untuk melaksanakan kehendaknya, sekalipun harus mengubah prosedur, institusi, dan bangunan hukum itu sendiri yang bisa menjadi penghalang.

Otoritas karismatik yang melekat pada dirinya kemudian digunakan untuk menjadikan dia sebagai seorang otokrat, yang menghendaki kuasa di tangannya secara tunggal personal sehingga ia bisa meniadakan hukum yang membatasi kuasanya (Mochtar, 2024). Otokrat semacam itu dapat leluasa membagi porsi kekuasaan sesuai kehendaknya, termasuk ke orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan cara sesuka hati. Oleh karenanya, menurut Mochtar, partai politik bukan sebagai pemegang kuasa, tetapi pemegang kendalinya di tangan Sang Otokrat. Partai politik bisa saja menentukan kebijakan dan memilih ketua umum dan perangkat partai lainnya secara mandiri, tetapi arahnya diatur oleh Jokowi dengan petunjuk-petunjuk halus yang ditampilkan melalui berbagai cara. Nyaris semua partai politik “diatur” oleh Jokowi, terutama menjelang kontestasi Pemilu dan Pilkada 2024. Partai politik yang menolak pengaturan sang otokrat tersebut akan ditempatkan sebagai seteru politik yang harus dibereskan, bisa dengan memecah kepengurusan partai, memberi hadiah berupa kursi jabatan, mengkriminalisasi tokoh atau bentuk apapun sesuai kepentingan Sang Otokrat. Hal semacam itu yang mengakibatkan parlemen menjadi tidak berdaya apabila berhadapan dengan politik dinasti keluarga Jokowi.

Perintah halus Jokowi juga memiliki kemujuran pada derajat tertentu. Perhatikan dinamika politik sebelum kontestasi Pemilu 2024, sejumlah politisi maupun elite datang menemui presiden untuk meminta restu berlaga dalam pilpres. Mulai dari Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem menemui Jokowi untuk minta restu mencalonkan Muhaimin Iskandar menjadi cawapres untuk Anies Baswedan pada 8 Desember 2023. Sebelumnya, ada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang juga meminta restu kepada Jokowi untuk maju sebagai calon presiden 2024. Lalu, Mohammad Mahfud MD dan Gibran yang juga meminta restu pada Jokowi untuk maju

sebagai cawapres 2024. Jokowi merestui semua kandidat capres dan cawapres tersebut.

Hal itu merupakan fenomena baru dalam demokrasi mutakhir Indonesia. Restu politik seorang presiden (Jokowi) begitu diharapkan membawa keberuntungan oleh mereka yang minta restu. Namun politik minta restu bukanlah hal yang baru dalam kultur Jawa. Ungkapan minta restu merupakan bentuk permohonan doa, dukungan, dan pengaruh dari seorang pemberi restu ke penerima restu. Dalam budaya Jawa, pemberi restu biasanya orangtua, keluarga maupun orang yang dihormati, dengan memberikan doa dan dukungan moral kepada anaknya atau sanak keluarga untuk tujuan tertentu agar selamat dan berkah, seperti menikah dan merantau ke wilayah baru. Maka, dalam budaya politik mutakhir, fenomena minta restu kepada presiden merupakan wujud permohonan halus dan simbolik berupa dukungan dan memberikan pengaruh kuasanya agar dimudahkan dalam menjalankan kontestasi pemilu.

Politik minta restu yang banyak dilakukan terhadap Presiden Jokowi merupakan praktik yang dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) karena netralitas presiden dapat dipertanyakan. Sebab, politik minta restu tidak berlangsung tiba-tiba, ia lahir melalui serangkaian kultur politik yang mengarah pada pengkultusan terhadap presiden, yang dilakukan oleh elite partai, politikus, bahkan menantu dan juga putra Jokowi yang meminta restu pada presiden agar sukses dalam mengikuti pemilu. Politik minta restu presiden dalam pemilu yang ditampilkan secara terang-terangan, tertutup maupun halus sejatinya menampilkan pesan-pesan simbolik dari presiden, yang dapat dimaknai secara beragam oleh publik.

Konsekuensi dari politik minta restu presiden yaitu menciptakan jasa, yang terbentuk secara alami dan bisa hilang, tetapi melekat pada diri pemimpin yang kuat (Antlov, 2002), karena ia telah menolong orang lain. Menurut Antlov (2002), jasa menjadi bagian dari ideologi perintah halus (*ideology of gentle hints*) karena jasa merupakan atribut kekuasaan karena adanya hubungan dua arah dengan orang yang membantunya. Jasa dalam konteks artikel ini merupakan instrumen yang diternak oleh Jokowi karena telah murah hati merestui siapa pun yang minta restu politik padanya, dan sebaliknya kelak politisi yang berhasil meraih kemenangan dalam pemilu akan memiliki hutang jasa pada si pemberi restu yakni Jokowi.

Bagi Antlov (Antlov, 2002), perintah halus tidak bisa diartikan sebagai saran yang lemah, tapi justru sebagai perintah yang sungguh-sungguh kuat yang sering ditutupi oleh kata-kata lembut dan halus, dan dilaksanakan dengan penuh hormat. Mengikuti teori Antlov tersebut maka dapat dijelaskan bahwa segala sesuatu yang disampaikan, diarahkan maupun diperintahkan secara simbolik oleh Jokowi, maka hal itu harus diwujudkan. Pilihan presiden adalah sesuatu yang tepat dan benar untuk rakyat, meski sebagai manusia, seorang presiden sekalipun dapat keliru. Namun, otoritas karismatik yang dimiliki oleh Jokowi membuat orang-orang di sekelilingnya maupun para pendukungnya meyakini bahwa ucapan presiden tidak salah dan karenanya harus dilaksanakan dengan loyalitas.

Ucapan presiden memiliki kekuatan seperti kultus untuk mengatur dan mempengaruhi perilaku orang lain. Pembentukan kultus dilakukan oleh penguasa secara terencana dengan mengarah pada tujuan-tujuan tertentu sehingga memaksa para sekutu untuk memujinya di hadapan yang lain. Penguasa membangun kultus dengan cara menggunakan pelbagai sumber daya negara untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Para diktator kelas dunia membangun kultus personalnya melalui hagiografer, fotografer, penulis, naskah, komposer, penyair, editor, dan koreografer sebagai alat propaganda (Dikötter, 2019). Menurut Dikötter, tujuan kultus yang dibangun oleh diktator bukan untuk membujuk masyarakat, tetapi untuk menegaskan keptuhan dan membingungkan akal sehat.

Pola-pola pembentukan kultus diktator seperti di atas, juga direproduksi dan diadaptasi oleh Jokowi. Jokowi sangat tekun mengola kekuatan teknologi digital dan merangkul kekuatan

akar rumput, artis, dan memelihara *influencer* maupun pendukung untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui akun media sosial mereka untuk mengukuhkan citra dan propaganda. Jokowi sensitif terhadap berita miring, dan baginya citra diri merupakan kekuatan mahapenting yang bisa menyelematkannya dari perbagai pertempuran (Tempo, 4/8/2024). Ia juga terus menjaga kepercayaan publik dengan blusukan ke berbagai daerah dan membuat kebijakan populis untuk membangun kultus pada dirinya.

### 3.3 Metafora Jokowiisme Sebagai Bentuk Kultus Presiden

Pangkal dari pembentukan kultus personal Jokowi berasal dari popularitas dan otoritasnya yang karismatik. Dua hal tersebut saling mempengaruhi sehingga memunculkan metafora Jokowiisme sebagai upaya para pendukungnya melegitimasi kepemimpinannya. Metafora Jokowiisme disuarakan oleh para politikus Andy Budiman dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada periode kedua kepemimpinan Jokowi (Kompas.id, 24/5/2023 dan edisi 21/6/2023), yang partainya sejak awal berdiri (2014) mendukung kemenangan Jokowi pada periode pertama. Menurut Andy Budiman Jokowiisme merupakan metafora pemimpin yang bekerja keras memajukan rakyat (Kompas.id, 24/5/2023). Jokowiisme, menurut Andy Budiman, metafora *the Indonesian dream*, politisi yang keren adalah politisi yang berpenampilan biasa-biasa saja dan dekat dengan rakyat, seperti Jokowi.

Metafora tersebut terkesan genit karena diberikan untuk tokoh yang masih berkuasa yaitu Jokowi. Umumnya penamaan metafora seperti Soekarnoisme, Marxisme, Komunisme, merupakan *isme* atau aliran-aliran suatu ideologi atau pandangan tertentu yang diberikan setelah tokoh besar itu telah wafat. Namun, metafora Jokowiisme dibuat ketika Jokowi belum menuntaskan tugasnya sebagai presiden di periode kedua. Jokowiisme merupakan pujian untuk Jokowi manakala ia disebut sebagai presiden yang memiliki keberanian dan karakter. Keberanian Jokowi dipuji karena dapat memilih arah di antara pilihan-pilihan yang rumit dan kompleks, yang memerlukan tekad untuk melampaui kerja-kerja yang rutin. Karakter Jokowi dipuji karena ia dapat mempertahankan suatu tindakan yang dianggap perlu diambil secara cepat.

Metafora Jokowiisme mengkultuskan tindakan seorang pemimpin negara yang berani mengambil keputusan dalam situasi yang sulit, seperti pengampunan pajak, membangun kereta bawah tanah, membangun jalan tol lebih dari dua ribu kilometer, bangun desa, pelabuhan, dan banyak infrastruktur lainnya di segala wilayah. Jokowiisme merupakan bentuk kekaguman dan puja puji terhadap Jokowi dari para pendukungnya, yang berharap kelak setelah Jokowi menyelesaikan masa tugasnya sebagai presiden, ia masih dikagumi dan diingat oleh rakyat luas. Corak populisme dengan membangun relasi personalistik Jokowi dengan partai maupun pendukungnya merupakan cara Jokowi untuk meluaskan pengaruh personalnya, yang dalam jangka panjang akan menguatkan kultus untuk memuliakan dirinya. Kultus itu dapat mengubah semua pendukungnya menjadi pembohong, manut atau malah mati kutu ketika berhadapan dengan masalah politik dinasti Jokowi. Berbagai pelanggaran hasil kepemimpinan otokrasi Jokowi hanya dibiarkan tanpa ada mekanisme pengawasan di parlemen (Mochtar, dalam Majalah Tempo 4/8/2024).

## 4. Simpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa kultus Jokowi bersumber dari otoritas yang karismatik yang dilengkapi dengan gaya pemerintahan yang populis. Sumber pengkultusan yang dibangun oleh Jokowi tersebut sejalan dengan teori dari Fukuyama (2017) dan Supriatma (2023) yang menilai gaya kepemimpinan populis punya peran dalam membentuk kultus pada penguasa.

Popularitas biasanya digunakan sebagai strategi politik, maka di tangan Jokowi popularitas juga ditopang oleh citra diri dan gaya kepemimpinan presiden yang sederhana dan merakyat dan ia terus berupaya menjaga dengan stabil bandul popularitasnya itu di mata publik sejak awal menjabat presiden. Pada periode kedua, Jokowi memasuki “masa panen” untuk menikmati popularitasnya itu dan sewaktu-waktu dapat ia gunakan untuk memberikan pengaruh dan mengendalikan perhatian masyarakat. Disitulah kultus Jokowi terjadi.

Kultus Jokowi bukan terletak pada aura macho maupun maskulinitas seperti yang ditampilkan oleh Vladimir Putin sebagai pemimpin tangguh (Sperling, 2016), dan Jokowi juga bukan tipikal pemimpin yang memiliki postur gagah seperti diktator. Gestur tubuh Jokowi yang kurus yang dilengkapi dengan setelan pakaian kasual-formal menunjukkan dia terlihat sederhana saat berada di kantor dan luar kantor. Citra pemimpin yang sederhana dan merakyat melekat pada dirinya, dan di mata publik citra sederhana yang ditampilkan Jokowi tersebut merupakan antitesis dari politikus-politikus lain sehingga pandangan Kimura (2017) ada benarnya, karena menyebut Jokowi sebagai penguasa yang karismatik dengan tetap membumi, santun, rendah hati, reformis dengan menunjukkan rekam jejak berpihak pada *wong cilik*.

Tidak cukup hanya itu. Jokowi sering kali menampilkan ekspresi emosi yang halus, tenang dengan diksi bahasa sehari-hari dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam wartawan maupun dalam situasi mendesak. Gestur, raut wajah, bahasa serta emosi halus yang ditampilkan oleh Jokowi tersebut dinamakan oleh Antlov (2002) sebagai emosi orang Jawa. Seluruh aspek-aspek kepribadian tersebut (bentuk tubuh, pakaian, gaya komunikasi, emosi) semakin mempertebal citra diri dan kemudian menjadi kekuatan simbolik bagi Jokowi sebagai pemimpin rakyat yang disegani. Pada posisi demikian ia dapat dengan leluasa menampilkan perintah-perintah halus maupun kode-kode simbolik dari kekuasaan untuk diarahkan kepada siapa saja dan dengan tujuan-tujuan tertentu. Bisa untuk mempengaruhi, mengkriminalisasi, mencopot jabatan, menggertak, bahkan merestui kandidat tertentu atau cara apapun yang mungkin untuk mengubah pola relasi dua arah menjadi satu arah, sesuai dengan kehendak dan kepentingannya. Disitulah efek dari kultus Jokowi dapat dilihat dan dirasakan.

Kekuatan operasi kultus Jokowi nyaris mirip seperti kekuatan diktator. Yang membedakan yaitu operasi kultusnya tersebut berjalan halus, rapi serta tidak blak-blakan di hadapan publik, bahkan sering kali operasinya dilakukan melalui ruang senyap dari institusi-institusi maupun “tangan-tangan kedua” yang digunakan olehnya. Maka, langkah Jokowi untuk cawe-cawe dan merestui putranya untuk maju menjadi cawapres dapat menentukan kemenangan terhadap Prabowo dan Gibran dalam Pemilu 2024, dengan menggunakan kekuatan kultus pada masyarakat luas. Pada akhirnya, kultus Jokowi menjadi berkah bagi kemenangan Prabowo dan Gibran dengan meraih 58,6 persen dari total suara sah nasional.

Pengkultusan juga memiliki konsekuensi bagi diri Jokowi sendiri dan juga dampak terhadap kontestasi pemilu. Bagi Jokowi, puja-puji terhadapnya dapat menciptakan akumulasi kekuasaan dan kekayaan. Pengkultusan dapat mewariskan kekuasaan kepada putranya maupun sanak keluarga atau figur-figur lain yang dikehendaki. Selain itu, dalam menjalankan pemerintah, popularitas yang tinggi dapat mengakumulasi kultus sehingga dapat menggerakkan kepatuhan dari bawahan untuk melakukan kerja-kerja pemerintahan yang efektif. Pengaruh kultus dapat terasa ketika pemerintah Jokowi dengan mudah membuat undang-undang baru dan juga membangun ibu kota baru di tengah hutan tanpa menunjukkan urgensi yang jelas. Sementara, penggunaan moda pengkultusan dalam pemilu dapat menimbulkan daya rusak yang dalam dan berdampak panjang. Apabila operasi pengkultusan dilakukan untuk memihak figur tertentu dalam pemilu, maka cara itu akan merusak moralitas publik dan juga menggeser habitus demokrasi menjadi otokrasi, dan jika itu terjadi bangsa ini memerlukan waktu panjang dan

tanggung jawab kolektif untuk memulihkan habitus tersebut.

## Referensi

- Adam, A. W. (2023, October 27). Dinasti Politik dan Kultus Individu. *Kompas.id*  
[https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/26/Dinasti-Politik-Dan-Kultus-Individu?Open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/26/Dinasti-Politik-Dan-Kultus-Individu?Open_from=Search_Result_Page).
- Antlov, H. (2002). *Negara dalam Desa; Patronase Kepemimpinan Lokal* (P. Semedi, Ed.; Cetakan I). Lappera Pustaka Utama.
- Antlov, H., & Cederroth, S. (2001). *Kepemimpinan Jawa; Perintah Halus, Pemerintah Otoriter* (P. Soemitro, Ed.; 1st ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Anugrah, I. (2017). Bangkitnya Populisme dan Krisis Demokrasi. *Jurnal Prisma*, Vol. 36, No. 3, 88-94.
- Anugrahanto, N. C. (2023, October 3). Pelajaran dari Relokasi PKL di Surakarta untuk Kasus Pulau Rempang. *Kompas.id*.  
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/01/pelajaran-dari-relokasi-pkl-di-surakarta-untuk-kasus-pulau-rempang>.
- Ben, B. (2020). *Man of Contradictions: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia*. Penguin Books.
- Budiman, A. (2023, June 21). Ideologi Pembangunan Jokowi. *Kompas.id*.  
[https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/20/ideologi-pembangunan-jokowi?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/20/ideologi-pembangunan-jokowi?open_from=Search_Result_Page).
- Budiman, B. N., Putriga, B. R., Safitri, B. D., & Imanuela, V. J. (2022). Populisme: Konsekuensi dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal PolGov*, Vol. 4 No. 1.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3916>.
- Cederroth, S. (2001). Modernisasi Orde Baru dan Islam; Aparat Desa dan Tokoh Agama (P. Soemitro, Trans.). In H. Antlov & S. Cederroth (Eds.), *Kepemimpinan Jawa; Perintah Halu, Pemerintahan Otoriter* (1st ed., pp. 188–2). Yayasan Obor Indonesia.
- Dikötter, F. (2019). *How To Be A Dictator; The Cult of Personality in the Twentieth Century*. Bloomsbury Publishing.
- Dwi Sulistiyani, M. (2018). Gaya Retorika Kepala Negara RI: Analisis Komparatif Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo. *Jurnal Audience*, Vol I No. 1.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33633/ja.v1i1.2682>.
- Fukuyama, F. (2017, December 22). What Is Populism? *Atlantik-Brücke Publication Series, Volume 08*, 1–32. <https://www.atlantik-bruecke.org/en/19230-2/>.
- Huda, M. S. (2011). Kultus Kiai: Sketsa Tradisi Pesantren. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 1, 1–18.
- Hidayana, B. (2011). Glembuk, Strategi Politik dalam Rekrutmen Elite Penguasa di Desa Pulungansari Yogyakarta. *Humaniora Universitas Gadjah Mada*, Vol 23, No. 1.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jh.1005>.
- Kimura, E. (2017, December 7). Populist Politics in Indonesia. *East-West Center, Number 407*.  
<http://www.jstor.com/stable/resrep17397>.
- Kompas.id - Cyprianus Anto Saptowalyono, N. S. (2023, May 29). Kesempatan Tak Datang Berkali-kali, untuk Kemajuan Bangsa Jokowi Akui Cawe-cawe. *Kompas.id*.  
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/29/presiden-jokowi-akui-cawe-cawe-untuk-kepentingan-negara>.
- Kompas.id - Nikolaus Harbowo, C. A. S. (2023, May 2). *Pertemuan Presiden Jokowi dengan Enam Ketum Parpol Diyakini Hasilkan Dua Kemungkinan*.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/02/pertemuan-presiden-jokowi-dengan-enam-ketum-parpol-diyakini-bisa-hasilkan-dua-kemungkinan>.

- Kusman, A. P. (2024, August 11). Bonapartisme Baru . *Majalah Tempo*, 104–105.
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). *Survei Nasional Debat Capres, Netralitas Pemilu, Dan Elektabilitas*.
- Maliki, Z. (2017). *Sosiologi Politik; Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Gajah Mada University Press.
- Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia. In *Policy Studies an East-West Center series*.  
<https://www.jstor.org/stable/resrep06525?searchText=Reinventing+Asian+Populism+Jokowi%27s+Rise%2C+Democracy%2C+and+Political+Contestation+in+Indonesia&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DReinventing%2BAsian%2BPopulism%253A%2BJokowi%25E2%2580%259>.
- Mochtar, Z. A. (2024, August 4). Otokrasi Penopang Dinasti. *Majalah Tempo*, 72–73.
- Mulder, N. (2001). Ideologi Kepemimpinan Jawa (P. Soemitro, Trans.). In H. Antlov & S. Cederroth (Eds.), *Kepemimpinan Jawa; Pemerintah Halus, Pemerintah Otoriter* (pp. 79–99). Yayasan Obor Indonesia.
- Purnamasari, D. D. (2023, October 14). Projo Nyatakan Dukung Prabowo, Pengamat: Sejauh Mana Soliditasnya? *Kompas.Id*. [https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/14/projo-resmi-dukung-prabowo-pengamat-sejauh-mana-soliditasnya?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/14/projo-resmi-dukung-prabowo-pengamat-sejauh-mana-soliditasnya?open_from=Search_Result_Page).
- Redaksi. (2023, October 30). Timang-Timbang Dinastiku. *Majalah Tempo*, 1-114.
- Redaksi. (2024, August 11). Beroposisilah, PDIP. *Majalah Tempo*, 1–106.
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar: Vol. Cetakan 49* (Edisi Revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Sperling, V. (2016). Putin's macho personality cult. *Communist and Post-Communist Studies - University of California Press*, 49 No. 1, 13–23. <https://www.jstor.org/stable/48610430>.
- Sukidi. (2024, April 18). Tinta Merah Megawati. *Harian Kompas*, 18 April 2.  
[https://www.kompas.id/baca/opini/2024/04/17/tinta-merah-megawati?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/baca/opini/2024/04/17/tinta-merah-megawati?open_from=Search_Result_Page).
- Sukmana, O., Komalawati, E., & Yuliasari, I. (2023). Gaya Komunikasi Publik Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 6, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id>.
- Supriatma, M. (2023, November 14). *Langkah Politik Jokowi: Dari Populis ke Oportunis? - Project Multatuli*. <https://Projectmultatuli.Org/>. <https://projectmultatuli.org/langkah-politik-jokowi-dari-populis-ke-oportunis/>.
- Tim Kompas. (2023, October 23). Jokowi Restui, Prabowo Pilih Gibran. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/22/jokowi-restui-prabowo-pilih-gibran>.
- Zulkifli, A. (2024, August 4). Jokowi: Apologia dan Media. *Majalah Tempo*, 154–155.